

SEJARAH ISLAM DI PAKISTAN DAN IDE-IDE PEMBAHARUAN MUHAMMAD ALI JINNAH

Sera Yuliantini*

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Indonesia
E-mail: dwysheera@gmail.com

Mauizatul Hasanah

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Indonesia
E-mail: mauizatulhasanah92@gmail.com

Agri Arisa

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Indonesia
E-mail: agriarisa@gmail.com

M. Dahlan. M

UIN Alauddin Makassar, Indonesia

Syamzan Syukur

UIN Alauddin Makassar, Indonesia
E-mail: syamzan.syukur@uin-alauddin.ac.id

Abstract

The history of Islam in Pakistan is a long story that began with the arrival of Islam on the Indian subcontinent through Islamic expansion in the 7th century. Islamic influence grew rapidly over time, making this region a center of Islamic culture with strong influences from Muslim kingdoms such as the Delhi Sultanate and the Mughal Empire. The formation of Pakistan in 1947 was an important point in the history of Islam in the region, where Pakistan was established as a state for Muslims based on Islamic religious and cultural principles. Muhammad Ali Jinnah, the founder and first leader of Pakistan, played a major role in the formation of this country. His ideas about religious freedom, minority rights, and the need for a modern and progressive Islamic state became an important basis in his political struggle. Jinnah emphasized the importance of inter-religious tolerance and unity among Muslims, while continuing to support democratic principles and state laws based on Islamic values. The reforms introduced by Jinnah aimed to ensure that

Pakistan's ethnic and religious diversity could coexist peacefully within a state framework that respected individual freedom and social justice. Thus, the history of Islam in Pakistan and Jinnah's reformist ideas played a central role in the country's development, illustrating how Islamic values and modern politics can go hand in hand in building an independent and inclusive state.

Keywords: History of Islam, Pakistan, Muhammad Ali Jinnah, Islamic Reform

Abstrak

Sejarah Islam di Pakistan merupakan kisah panjang yang dimulai sejak era kedatangan Islam di subkontinen India melalui ekspansi Islam di abad ke-7. Pengaruh Islam berkembang pesat seiring dengan berlalunya waktu, yang menjadikan wilayah ini sebagai pusat kebudayaan Islam dengan pengaruh kuat dari kerajaan-kerajaan Muslim seperti Delhi Sultanate dan Mughal Empire. Pembentukan Pakistan pada tahun 1947 menjadi titik penting dalam sejarah Islam di wilayah ini, di mana Pakistan didirikan sebagai negara untuk umat Muslim berdasarkan prinsip-prinsip keagamaan dan budaya Islam. Muhammad Ali Jinnah, pendiri dan pemimpin pertama Pakistan, memainkan peran utama dalam pembentukan negara ini. Ide-idenya tentang kebebasan agama, hak-hak minoritas, dan perlunya negara Islam yang modern dan progresif menjadi landasan penting dalam perjuangan politiknya. Jinnah menekankan pentingnya toleransi antar umat beragama dan persatuan di antara umat Muslim, sambil tetap mendukung prinsip-prinsip demokrasi dan hukum negara yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Pembaharuan yang diperkenalkan oleh Jinnah bertujuan untuk memastikan keberagaman etnis dan keagamaan di Pakistan dapat hidup berdampingan dengan damai dalam kerangka negara yang menghargai kebebasan individu dan keadilan sosial. Dengan demikian, sejarah Islam di Pakistan dan ide-ide pembaharuan Jinnah memainkan peran sentral dalam perkembangan negara tersebut, menggambarkan bagaimana nilai-nilai Islam dan politik modern dapat berjalan seiring dalam membangun negara yang mandiri dan inklusif.

Kata Kunci: Sejarah Islam, Pakistan, Muhammad Ali Jinnah, Pembaharuan Islam

PENDAHULUAN

Sejarah Islam di Pakistan merupakan bagian integral dari perjalanan panjang peradaban Islam di wilayah Asia Selatan. Sejak kedatangan Islam pada abad ke-8 melalui pedagang Arab dan kemudian diperkuat oleh penaklukan dinasti Ghaznawi dan Mughal, agama Islam telah memainkan peran sentral dalam membentuk identitas dan budaya di wilayah yang kini dikenal sebagai Pakistan. Pada tahun 1947, setelah berabad-abad berada di bawah kekuasaan Inggris, kawasan ini berhasil meraih kemerdekaan dan mendirikan Republik Islam Pakistan (Asriyah, 2017). Pembentukan negara baru ini dilatarbelakangi oleh semangat untuk menciptakan sebuah negara yang berlandaskan syariat Islam dan mengakomodasi aspirasi Muslim yang telah lama terpinggirkan dalam masyarakat kolonial Inggris (Al-Haddad, 2022).

Salah satu tokoh kunci dalam pembentukan Pakistan adalah Muhammad Ali Jinnah, yang secara luas dikenal sebagai "Quaid-e-Azam" atau "Pemimpin Besar". Jinnah adalah seorang pengacara dan politisi yang memainkan peran utama dalam mewujudkan gagasan akan sebuah negara Muslim yang merdeka. Melalui berbagai pidato dan tulisannya, Jinnah menyuarakan ide-ide pembaharuan yang mencerminkan pandangannya tentang negara yang modern namun tetap berpegang pada asas-asas Islam. Dia menekankan pentingnya persatuan, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap hak-hak minoritas serta perempuan dalam tatanan baru negara Pakistan. Dedikasinya terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan kepentingan rakyat membuatnya dihormati sebagai bapak bangsa Pakistan.

Harun Nasution dalam bukunya *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan* (1975), ia menjelaskan bahwa Muhammad Ali Jinnah adalah seorang yang telah berhasil melaksanakan apa yang telah dikonsepsi oleh Muhammad Iqbal tentang berdirinya negara Pakistan. Karena telah berhasil mengkonsep seperti apa Pakistan akan didirikan meskipun belum ada gambaran ataupun batasan-batasan, Muhammad Iqbal adalah tokoh yang paling berjasa terhadap Pakistan sehingga tidak salah kalau rakyat Pakistan menyebutnya dengan istilah Bapak Pakistan. Selain merealisasikan apa yang telah dikonsepsi oleh Muhammad Iqbal, Muhammad Ali Jinnah juga dikenal sebagai penghembus roh pembaharuan bagi masyarakat Pakistan. Meskipun pada dasarnya jauh sebelum Pakistan didirikan, yaitu ketika umat Islam India dan Umat Hindu India masih berada di bawah satu payung yaitu India, pembaharuan itu telah ada pada akhir abad kedelapan belas dengan tokohnya yaitu Syah Waliullah dan dilanjutkan oleh Sayid Ahmad Khan yang kemudian

diteruskan oleh Iqbal dan baru kemudian terealisasi oleh Muhammad Ali Jinnah (Hamidah, 2018).

Ide-ide pembaharuan Jinnah tidak berhenti pada pendirian negara semata, tetapi juga merambah ke bagaimana negara tersebut seharusnya berfungsi untuk kepentingan masyarakatnya. Jinnah berjuang untuk menciptakan Pakistan yang adil dan inklusif, di mana hukum Islam bisa dijalankan sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan modernisasi. Hal ini melibatkan reformasi dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan sistem pemerintahan untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat mendapatkan hak dan kesempatan yang sama (Inayati et al., 2022). Pemikirannya yang visioner dan komitmennya terhadap nilai-nilai Islam yang progresif terus menjadi inspirasi bagi banyak pemimpin dan masyarakat Pakistan hingga saat ini.

METODE PENELITIAN

Kajian pada penelitian ini menggunakan metode literatur. Metode penelitian literatur adalah pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menilai, dan menginterpretasikan informasi yang tersedia dari berbagai sumber yang sudah ada, seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen lain yang relevan. Tujuan dari metode ini adalah untuk memahami konsep, teori, dan temuan yang telah dipublikasikan oleh peneliti sebelumnya, sehingga dapat memberikan landasan teoritis yang kuat bagi penelitian baru (Sahar, 2008); (Arikunto, 2000). Proses ini melibatkan pencarian literatur yang komprehensif, penyeleksian sumber yang relevan, penyusunan ringkasan atau sintesis dari informasi yang diperoleh, serta analisis kritis terhadap keterkaitan dan kesenjangan dalam pengetahuan yang ada. Penelitian literatur membantu peneliti memetakan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang tertentu, serta mengidentifikasi peluang untuk kontribusi baru dalam penelitian selanjutnya (Fadli, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Islam Di Pakistan

Pakistan adalah sebuah negara berdaulat di Asia Selatan yang berbatasan dengan India di sebelah timur, Afganistan dan Iran di sebelah barat, China di sebelah utara, dan Samudra Hindia di sebelah selatan. Negara ini memiliki luas wilayah sekitar 796.095 kilometer persegi dan populasinya mencapai sekitar 220 juta jiwa. Islamabad adalah ibu kota Pakistan dan Karachi adalah kota terbesarnya. Penduduk Pakistan memiliki keanekaragaman

budaya dan agama, di mana mayoritas penduduknya adalah Muslim. Selain itu, negara ini memiliki sejarah yang kaya dan penting, meliputi kekuasaan Kekaisaran Mughal dan gerakan perjuangan untuk kemerdekaan dari kolonialisme Inggris. Pakistan juga dihadapkan dengan sejumlah tantangan seperti masalah kemiskinan, konflik regional, dan terorisme. Namun, negara ini tetap menjadi kekuatan penting di kawasan Asia Selatan dan memiliki potensi yang besar untuk terus berkembang ke depannya (Barella et al., 2023).

Meskipun mereka berasal dari lima kelompok etnis yang berbeda – Punjabi, Sindhi, Pathan, Baluch, dan Muhajir (imigran berbahasa urdu dari India sebelum perpecahan) – mayoritas orang Pakistan yaitu sebesar 97 persen adalah muslim. 10 – 15 persen adalah Syi'ah yang mayoritas menganut Syiah Isthna 'Asyariyah. Minoritas sekte Syi'ah termasuk Ismailiyah, terdapat di Karachi dan wilayah barat laut Gilgit, dan Bohoras, yang markas spiritualnya terletak di Bombay, India. Mayoritas besar kaum muslim Sunni Pakistan menganut Mazhab Hanafi meskipun minoritas kecil pengikut mazhab Hanbali (Munawir, 2011). Pakistan adalah Negara yang satu-satunya Negara muslim yang didirikan atas nama Islam. Dengan demikian, pengalaman politik Pakistan secara integral berkaitan dengan perjuangan kaum muslim India untuk menemukan pemerintahan politik berdaulat yang baru setelah kehilangan kekuasaannya dari Inggris pada awal abad ke Sembilan belas. Berawal dengan gerakan Aligarh dari sir Sayyid Ahmad Khan untuk reformasi pendidikan dan intelektual-agama serta kegigihannya untuk identitas politik yang terpisah dan hak-hak bagi kaum muslim India, kebangkitan kaum muslim India beraksi melalui gerakan agama seperti gerakan mujahidin pimpinan Sayyid Ahmad Syahid dan gerakan Deoband pimpinan Maulana Mahmud Qasim Nanautvi (1821- 1880) serta Maulana Mahmud Al-Hasan (1851-1920). Pada saat gerakan Mujahidin melancarkan jihad bersenjata untuk memulihkan kekuasaan politik muslim di India barat laut, kemudian Deobandi dan gerakan pendidikan Islam lain mencoba membantu kaum muslim India mempertahankan warisan muslim tradisional pada masa subordinasi politik mereka. Konsep daerah politik muslim berdaulat tetap dipelihara oleh Muhammad Ali (1897-1931) dan Bahadur Yar Jang (1905-1944), dan diperkuat dengan munculnya gerakan khilafat pada tahun 1920-an di bawah pimpinan Ali bersaudara (Bearman & Peters, 2016).

Pakistan memperoleh kemerdekaannya pada tanggal 14 tanggal 1947 Nasionalisme Pakistan dimulai sejak adanya perselisihan antara Hindu dan Islam (Islam, 1994). Perselisihan ini terjadi karena kaum muslimin merasa tidak dihiraukan oleh Kongres Nasional India di mana rata-rata dipegang oleh

masyarakat penganut Hindu. Perang dunia pertama usai, kaum Muslimin mulai melancarkan usaha balasan dengan membentuk kesepakatan internal demi kemerdekaan dengan melepas diri dari India. Gagasan ini diperoleh Muhammad Ali Jinnah. Tahun 1940, Muhammad Ali Jinnah membangun sebuah wadah diberi nama Liga Muslim India. Melalui wadah ini, ia melontarkan ide serta gagasannya untuk mendirikan negara Islam yang berdaulat, serta lepas dari India.

Pada dasarnya, Negara Pakistan terbentuk tidak dapat dilepaskan dari beberapa faktor yakni: agama dan budaya, ekonomi, pendidikan dan politik sebelum mencapai kemerdekaannya pada tanggal 14 Agustus 1947. Rakyat Pakistan pada hakikatnya adalah orang-orang India yang beragama Islam. Tuntutan umat Islam untuk memperoleh pemerintahan sendiri adalah tuntutan yang wajar. Namun, menurut politisi Muslim India yang terinspirasi pemikiran Iqbal, pemerintahan ini akan mengalami kesulitan karena adanya dua perbedaan budaya dan keyakinan. Maka dari itu, Muhammad Ali Jinnah sebagai tokoh Pakistan menerjemahkan secara praktis ide Muhammad Iqbal dan lahirlah negara Pakistan dari teori dua bangsa. Nama Pakistan itu sendiri diperkenalkan oleh seorang mahasiswa Islam India bernama Khudri Rahmat Ali di London. Huruf P adalah Punjab, A menunjukkan Afghan, K berarti Kashmir, S adalah Sindi, dan Tan menunjukkan Baluchistan serta berarti negara (Amal, 1989).

Pada tahun 1971 terjadi perang saudara antara Pakistan Timur dengan Pakistan Barat yang berujung pada terpisahnya Pakistan Timur menjadi sebuah negara baru yang dikenal saat ini dengan negara Bangladesh. Ketika kondisi kekacauan ini, Ketua umum Partai Rakyat Pakistan yang beraliran sekuler, Zulfikar Ali Bhutto terpilih menjadi Kepala Negara menggantikan Agha Mohammad Yahya Khan. Ia menawarkan untuk menggabungkan konsep Islam dengan sosialisme. Setelah Pakistan berdiri sebagai sebuah negara yang berlandaskan ideologi Islam, dalam konstitusinya negara ini diberi nama Republik Islam Pakistan. Pada perjalanannya, identitas keislaman negara ini sempat dihilangkan. Namun karena sudah tertanam dalam diri masyarakat Pakistan, nuansa keislaman masih sangat terasa (Syadzali, 1993).

Menurut informasi dalam Ensiklopedi Islam disebutkan bahwa Islam masuk ke Pakistan berawal pada kaum muslim di masa pemerintahan Dinasti Umayyah melakukan ekspansi ke daerah Sindi yang sekarang Punjab. Ekspansi ini terjadi ketika Raja Al-Walid 1 (705-715) mengutus Muhammad bin Qasim. Daerah tersebut diperintah oleh keluarga Brahmana (kasta tertinggi bagi masyarakat Hindu) dan agama rakyat umumnya adalah Budha. Pembentukan

pemukiman dan pemerintahannya terjadi saat orang-orang Gaznawi mendirikan Lahore sebagai ibu kota pada tahun 1021 . Islamisasi yang sesungguhnya di negeri itu (Sindi/Punjab) dilancarkan oleh Mahmud Gaznawi (971-1030), penguasa daerah kecil Turki di Afganistan. Gaznawi mendapat kesempatan melakukan ekspedisi dalam rangka Islamisasi di daratan India ketika Kerajaan Samaniah di Khurasan dan Transoksania runtuh. Mahmud Gaznawi mengalahkan raja-raja Hindu dan Punjab pada tahun 1005. Pada tahun 1021 ia menaklukkan Kashmir dan menghancurkan candi Somanat. Demikian ketika ia melakukan dakwah Islam, sehingga penduduk daerah ini segera menganut Islam dan ia menumbuhkan semangat keilmuan di kalangan umat Islam.

Pada abad ke 13 ekspansi Islam berlanjut dan mencapai puncaknya pada masa Dinasti Mughal. Menurut Harun Nasution, Kerajaan Mughal didirikan oleh orang-orang yang berasal dari Asia Tengah, yang berlainan bangsa dan agama dengan orang Hindu. Mayoritas rakyat Kerajaan Mughal memeluk agama Hindu, sehingga dinasti asing ini tidak mudah diterima oleh penduduk asli (Nasution, 1982). Kerajaan Mughal didirikan oleh Babar pada tahun 1526. Gelar kebangsawanan Muslim raja-raja Mughal sangat melekat. Misalnya Nuruddin untuk Jahangir, Syihab al-Din untuk Syah Jehan dan Muhyiddin untuk Aurangzeb. Dalam pandangan pakar sejarah modern, penguasa Mughal adalah pemimpin Muslim ideal. Kekuatan Kerajaan Islam Mughal menurun akibat kepemimpinan sebagian raja-rajanya. Ketika itu, golongan Hindu mulai bergerak, terutama kaum Mahrata. Kaum Mahrata membentuk kerajaan yang merdeka di India Barat. Selain Hindu, kaum Sikh juga bergerak melawan Kerajaan Mughal. Dalam pada itu berdiri juga kerajaan-kerajaan kecil, sehingga Kerajaan Mughal semakin lama semakin kecil dan menurun kekuatannya. Daerah yang dahulu terletak di bawah kekuasaan Islam, kini jatuh ke tangan bukan Islam. Di sini muncullah persoalan dar al-harb bagi daerah-daerah yang dikuasai oleh non Muslim. Adapun daerah-daerah yang masih dikuasai oleh Islam disebut dar al-Islam. Kategori daerah semacam ini jelas menunjukkan pemahaman umat Islam di Kerajaan Mughal sangat kuat (Thohir & Wagianto, 2019).

Ide-Ide Pembaharuan Muhammad Ali Jinnah

Adapun ide-ide pembaharuan dari Muhammad Ali Jinnah sebagai berikut:

1. Pembaharuan konstitusional

Muhammad Ali Jinnah adalah pemimpin politik utama di India yang memperjuangkan hak-hak Muslim dan berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan bagi mereka. Usulan Muhammad Ali Jinnah mengenai kerangka konstitusional yang menghormati hak-hak Muslim terutama diwujudkan dalam konsep "Pakatan Negara Dua" atau "Two-Nation Theory" (Şahbaz, 2020). Menurutny, Hindu dan Muslim adalah dua bangsa yang berbeda di India, dan mereka membutuhkan ruang politik yang terpisah untuk mempertahankan identitas agama dan kebudayaan mereka. Muhammad Ali Jinnah menekankan perlunya menciptakan sebuah negara baru yang diberi nama Pakistan, di mana Muslim dapat hidup bebas dan merdeka dalam sebuah konstitusi yang mengakui hak-hak mereka. Dalam usulan-usulannya, Muhammad Ali Jinnah menginginkan adanya perlindungan hak-hak minoritas Muslim dalam konstitusi Pakistan, termasuk hak-hak politik, kebebasan beragama dan kemajuan ekonomi (Jan, 2022). Beliau juga merekomendasikan undang-undang yang memperbolehkan wanita mendapat hak hak seperti hak bersuara, kebebasan bergerak, dan untuk bekerja di tempat-tempat umum. Muhammad Ali Jinnah ingin memastikan bahwa kepentingan dan aspirasi Muslim diakui dan dihormati dalam kerangka konstitusional negara baru. Usulan Jinnah ini mencerminkan kepedulian dan perjuangan yang luas untuk memastikan eksistensi serta kebebasan Muslim di India. Kerangka konstitusional yang diusulkan oleh Jinnah membantu menyelaraskan kepentingan Muslim dalam rangka menghormati identitas agama dan budaya mereka dalam kerangka negara yang baru terbentuk .

Dalam pidatonya pada pertemuan Majelis Konstituen Pakistan pada 11 Agustus 1947, Muhammad Ali Jinnah menyatakan bahwa mereka ingin Pakistan menjadi negara Muslim yang dihormati dan diakui karena nilai-nilai kebebasan, keadilan, dan pengambilan keputusan yang didasarkan pada hati nurani pribadi warga negaranya. Muhammad Ali Jinnah dengan tegas percaya pada prinsip kebebasan beragama, di mana setiap individu memiliki hak untuk beribadah sesuai agamanya tanpa diskriminasi atau paksaan. Ia menekankan bahwa setiap warga negara, terlepas dari kepercayaan agama mereka, harus dapat menikmati hak-hak dan kebebasan mereka dalam masyarakat yang demokratis dan inklusif. Selain itu, Muhammad Ali Jinnah adalah pendukung kuat perlindungan hak minoritas. Ia menyadari bahwa pembentukan sistem politik yang adil dan berkeadilan memerlukan perlindungan hak-hak minoritas untuk memastikan partisipasi dan representasi mereka yang sama dalam pemerintahan negara. Beliau

percaya bahwa masyarakat yang demokratis harus memberikan kesempatan dan perlindungan yang sama kepada semua warganya, tanpa mempedulikan latar belakang agama atau etnis mereka (Barella et al., 2023).

2. Pembaharuan Politik

Muhammad Ali Jinnah memimpin upaya untuk membangun sistem pemerintahan yang demokratis dan transparan di negaranya. Dia mengakui pentingnya demokrasi dalam membangun satu bangsa yang kokoh dan percaya bahwa rakyat Pakistan harus memiliki kekuatan untuk memilih pemerintah yang melayani mereka dan mengelola negara yang adil dan baik. Muhammad Ali Jinnah memimpin penyusunan konstitusi baru Pakistan, yang menetapkan landasan bagi sistem pemerintahan demokratis yang transparan. Sebuah Majelis Konstitusi dibentuk untuk membuat dokumen ini, yang ditulis pada tahun 1956. Konstitusi Pakistan menetapkan sistem pemerintahan federal dan parlementer, di mana rakyat Pakistan memilih anggota parlemen dalam pemilu yang diadakan setiap lima tahun untuk mewakili mereka di Majelis Rakyat (Dewan Rakyat). Selain itu, Muhammad Ali Jinnah juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan dan memerintahkan penyediaan laporan transparan tentang pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Dia juga mengawasi pembentukan Dewan Pengawas, yang bertanggung jawab untuk melakukan audit terhadap pengeluaran pemerintah dan memastikan bahwa dana publik digunakan secara efektif dan efisien.

Terdapat beberapa catatan yang menjelaskan bahwa Muhammad Ali Jinnah mempromosikan kebebasan pers dan kebebasan berpendapat sebagai pilar penting dalam pembangunan negara, terutama setelah pembentukan Pakistan. Menurut pemahaman Muhammad Ali Jinnah, kebebasan pers dan kebebasan berpendapat adalah hak asasi manusia fundamental, dan sikap terbuka terhadap pandangan, gagasan, dan kritik mutlak diperlukan untuk mencapai kemajuan dalam setiap negara. Jinnah mengakui pentingnya pers yang bebas dalam memastikan kebijakan pemerintah dapat dikritik dengan terbuka. Dia juga menggarisbawahi bahwa kebebasan berpendapat harus diberikan kepada semua orang, tanpa pandang bulu, dan bahkan kepada mereka yang berpendapat berbeda dengan pemerintah (A, 2014).

3. Pembaharuan sosial

- a. Mengupayakan pemberantasan diskriminasi dan penindasan, baik dalam masyarakat maupun sistem hukum

Muhammad Ali Jinnah telah berperan penting dalam memperjuangkan pemberantasan diskriminasi dan penindasan baik dalam masyarakat maupun sistem hukum. Muhammad Ali Jinnah berjuang untuk hak-hak umat Muslim di India yang dikuasai oleh Inggris dan bekerja untuk terbentuknya negara yang terpisah bagi umat Muslim, yang kemudian menjadi Pakistan. Beliau adalah seorang pembela yang gigih untuk hak-hak minoritas dan kebebasan beragama. Beliau percaya pada masyarakat di mana semua individu, tanpa memandang agama mereka, memiliki hak dan kesempatan yang setara. Sebagai pemimpin Liga Muslim India, beliau juga memperjuangkan hak-hak umat Muslim yang menghadapi diskriminasi dan penindasan di India yang dikuasai Inggris (Barella et al., 2023).

- b. Mendorong perluasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial bagi semua warga Pakistan

Sebagai Gubernur Jenderal pertama Pakistan, beliau menekankan pentingnya pendidikan dan bekerja untuk mendirikan institusi pendidikan di seluruh negara. Muhammad Ali Jinnah menyadari bahwa pendidikan sangat penting bagi perkembangan Pakistan, dan ia mempromosikan pembentukan universitas, seperti Universitas Punjab dan Universitas Dhaka, untuk memberikan kesempatan pendidikan tinggi kepada rakyat Pakistan. Selain pendidikan, Muhammad Ali Jinnah juga menekankan pentingnya kesehatan dan kesejahteraan sosial bagi rakyat Pakistan. Beliau bekerja keras untuk mendirikan fasilitas kesehatan dan program kesejahteraan sosial di seluruh negara untuk meningkatkan kesejahteraan warga negaranya. Muhammad Ali Jinnah membayangkan sebuah negara di mana semua warga Pakistan memiliki akses ke kebutuhan dasar dan layanan kesehatan, tanpa memandang status sosial-ekonomi mereka (Barella et al., 2023).

- c. Menekankan pentingnya kemajuan ekonomi dan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat

Muhammad Ali Jinnah menekankan perlunya pertumbuhan ekonomi sebagai sarana untuk meningkatkan dan memperbaiki standar hidup bagi rakyat Pakistan. Beliau memahami bahwa kemajuan ekonomi dapat memberikan kesempatan kerja, meningkatkan tingkat pendapatan, dan mengurangi kemiskinan. Dengan pendekatan yang terfokus pada pembangunan ekonomi, Muhammad Ali Jinnah bertujuan

untuk menciptakan sebuah negara yang makmur yang dapat mendukung warganya dan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi mereka. Selain itu, Muhammad Ali Jinnah menyadari bahwa pembangunan infrastruktur adalah hal yang penting untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup (Barella et al., 2023).

KESIMPULAN

Sejarah Islam di Pakistan berawal sejak abad ke-7 Masehi ketika Islam pertama kali masuk ke wilayah ini melalui perantaraan pedagang dan pasukan Muslim yang dipimpin oleh Muhammad bin Qasim. Wilayah ini kemudian menjadi bagian dari berbagai kekhalifahan Islam, seperti Kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah. Pada abad ke-19, saat Pakistan masih bagian dari India Britania, umat Islam di wilayah ini mulai merasakan ketidakadilan dalam struktur sosial-politik yang didominasi oleh umat Hindu dan kolonial Inggris. Proses pembentukan identitas Islam di wilayah ini semakin kuat seiring dengan munculnya gerakan politik dan sosial yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Sir Syed Ahmad Khan dan Allama Iqbal. Akhirnya, pada tahun 1947, Pakistan terbentuk sebagai negara Muslim yang merdeka dari India, berkat perjuangan dan upaya tokoh-tokoh seperti Muhammad Ali Jinnah, yang berperan penting dalam mewujudkan cita-cita tersebut.

Muhammad Ali Jinnah, sebagai pendiri dan pemimpin pertama Pakistan, tidak hanya dikenal karena perjuangannya untuk kemerdekaan, tetapi juga karena ide-idenya yang mengusung pembaharuan dan moderasi dalam Islam. Jinnah berupaya menciptakan sebuah negara yang menghormati hak-hak individu dan mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dengan modernitas. Ia menekankan pentingnya persatuan, toleransi, dan kemajuan ekonomi, serta mendukung pemisahan agama dari urusan negara dalam batas tertentu untuk menjaga keberagaman di Pakistan. Ide-idenya tentang pembaharuan sosial dan politik berfokus pada perlunya menciptakan sistem pemerintahan yang inklusif dan adil, di mana setiap warga negara, terlepas dari agama atau etnis, memiliki hak yang setara.

DAFTAR PUSTAKA

- A, A. (2014). NASIONALISME DAN PEMBENTUKAN NEGARA ISLAM PAKISTAN. *Jurnal Politik Profetik*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.24252/profetik.v2i2a2>
- Al-Haddad, B. (2022). Muhamad Iqbal Dalam Kontribusi Pemikiran Dan Pembaharuan Islam Di India-Pakistan. *Al-Tadabbur*, 8(1), 63–80.

- Amal, T. A. (1989). *Islam dan tantangan modernitas: Studi atas pemikiran hukum Fazlur Rahman* (Vol. 11). Mizan.
- Arikunto, S. (2000). *Manajemen Penelitian* (Jakarta). Rineka Cipta. <https://doi.org/10.24127/felibrary.v5i2.4164>
- Asriyah, A. (2017). PERKEMBANGAN ISLAM DI PAKISTAN. *Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.24252/rihlah.v5i2.4164>
- Barella, Y., Kholifatun, U. N., Hasaruddin, H., & Syukur, S. (2023). Menelusuri Sejarah Islam di Pakistan: Eksplorasi Ide Pembaharuan Muhammad Ali Jinnah. *Intizar*, 29(2), Article 2. <https://doi.org/10.19109/intizar.v29i2.20079>
- Bearman, P., & Peters, R. (2016). *The Ashgate research companion to Islamic law*. Routledge. <https://api.taylorfrancis.com/content/books/mono/download?identifierName=doi&identifierValue=10.4324/9781315613093&type=googlepdf>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *HUMANIKA*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Hamidah, H. (2018). Perjuangan dan Pengaruh Muhammad Ali Jinnah Dalam Pembentukan Negara Pakistan. *Kontekstualita*, 32(01), Article 01. <https://ojp.e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/index.php/Kontekstualita/article/view/29>
- Inayati, A., Santalia, I., & Wahyuddin, G. (2022). Sejarah Islam Di Pakistan, Ide Pembaharuan Dan Perjuangan Muhammad Ali Jinnah. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 11(1), 635–644.
- Islam, E. (1994). *PT Ihtiar Baru Van Hoeve*. Jakarta, tt.
- Jan, F. N. (2022). At 75, Pakistan has moved far from the secular and democratic vision of its founder, Mohammad Ali Jinnah. *The Conversation*. <https://Theconversation.com/at-75-Pakistan-Has-Moved-Far-From-the-Secular-and-Democratic-Vision-of-Its-Founder-Mohammad-Ali-Jinnah-187238>.
- Munawir, M. F. (2011). RELEVANSI PEMIKIRAN SAYYID QUTB TENTANG TAFSIR JAHILIYAH BAGI DAKWAH DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM KONTEMPORER. *Jurnal Dakwah*, 12(1), Article 1.
- Nasution, H. 1919-1998. (1982). *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah pemikiran dan gerakan* (Cet. 2). Bulan Bintang.
- Sahar, J. (2008). Kritik Pada Penelitian Kualitatif. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 12(3), 197–203. <https://doi.org/10.7454/jki.v12i3.222>
- Şahbaz, D. (2020). The Two Nations Theory and It's Role In The Establishment of Pakistan. *Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi*, 7(1), Article 1.
- Syadzali, H. M. (1993). *Islam dan Tata Negara: Ajaran dan Pemikiran*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Thohir, U. F., & Wagianto, R. (2019). Pembaharuan Hukum Waris Islam di Turki. *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v5i2.121>